

**PERMATA INDONESIA**  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

# DISKUSI INTERAKTIF

## BABAK BARU UNDANG-UNDANG MINERBA

PUSHEP, JAKARTA – 18 JUNI 2020

**ILHAM RIFKI NURFAJAR**

Sekjend Perhimpunan Mahasiswa  
Pertambangan Indonesia

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN AGROBISNIS & PERTAMBANGAN INDONESIA

# CONTENT

01

Pendahuluan

02

Pertambangan Bagi Kehidupan?

03

Polemik Undang-Undang Minerba

04

Pandangan dan Sikap Permata Indonesia

# 1

## PENDAHULUAN





ILHAM R. NURFAJAR

**CONTACT**

Perumahan Wisma-mas Blok  
DI-15, RT 05, RW14,  
Kabupaten Tangerang

08158955893

Ilhamrifki26@gmail.com

**SKILLS**

- Microsoft
- Autocad
- Maptek Vulcan
- Slide
- CorelDraw

**LANGUAGES**

- Indonesia
- English

"As good as Humans are the most beneficial to others" (HR. Ahmad)

**PROFESSIONAL SUMMARY**

I'm a man, was born on Tangerang city at 26<sup>th</sup> May 1998. Besides studying in mining engineering departement of Bandung Islamic University, I was also active in organizations both internally and externally campus. this is because my pleasure in solving a problem and motivation is always beneficial to the surrounding environment.

**ORGANIZATION EXPERIENCE**

2017 - 2018

Staff Departement External, HMTF, Bandung Islamic University  
Responsibilities:

- Establish establish relationships with other organizations
- Maintain Image of the organization

2018 – 2019

Staff Departement External, HMTF, Bandung Islamic University  
Responsibilities:

- Establish establish relationships with other organizations
- Maintain Image of the organization

2018 – 2020

Secretary General, Association Of Indonesian Student Mining,  
PERMATA INDONESIA  
Responsibilities:

- Lead the movement Indonesian mining student
- ensure and service all Indonesian mining student needs

**EDUCATION, TRAINING, AND AWARDS**

2016

Registered as Mining Engineering Student, Mining Engineering Dept.,  
Bandung Islamic University

2017

Certified as Participant, Engineering Student Competition – Trisakti  
University

2018

Certified as education and training student, Underground mine training  
center – Sawahlunto

2018

Certified as participant, Indonesian Student Mining Competition (ISMC)  
XI – ITB

2019

Certified as Participant, Short Course, RPM Global at TPT PERHAPI  
XXVIII – Lombok

2020

Certified as Participant, Underground Support and Control Technical  
Guidance, PPSDM Geominerba - Bandung



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

# Curriculum Vitae



# PERMATA INDONESIA



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

**Terdiri atas berbagai  
Himpunan Mahasiswa Teknik  
Pertambangan se-Indonesia**



**Aktif menyelenggarakan  
kegiatan AKADEMIS.**

**Aktif memberikan masukan  
konstruktif kepada PEMERINTAH  
& PELAKU USAHA**



**Aktif berpartisipasi  
dalam kegiatan SOSIAL.**

# 2

## Mining For Life?



**PERMATA INDONESIA**  
PERMATA PENERUS MATAHARI PERTAMANGAN INDONESIA

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

# MineLifeFact

## MINING HISTORICAL

Mining activities are not new and indeed may have started in Neolithic (Chalcolithic) times to obtain the first metals for tool fabrication (Reardon 2011).

## PRA SEJARAH

<b>Paleolitikum</b>	<b>Megalitikum</b>	<b>Neolitikum</b>
1jt-600.000 SM	500.000 SM	100.000-50.000 SM
P. Erektus	H. Sapiens	H. Erektus
Zaman Batu	Zaman Perunggu	Zaman Besi

# MineLifeFact

## Mine Effect

### Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?

oleh Dedek Hendry, Bengkulu di 17 May 2017



Negera tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batubara yang terindikasi kuat melanggar hak esasi manusia (HAM) dan aturan. Sehingga, perusahaan tambang batubara merasa jelassa beroperasi. Direktur Eksekutif Daerah Wahli Bengkulu Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada *Mongabay Indonesia*.

"Kami (Wahli Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. Ini sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat sikap pemerintah daerah

### Nauru Jadi Negara Tukang Utang

Redaksi  
14 April 2020



www.pushep.or.id

BAGIKAN: 36 Anak di Kaltim Tewas Tenggelam di Lubang Tambang: Saya Lihat Cucu Mengambang di Danau...

Home / News / Regional

**BBC NEWS** | INDONESIA

### 36 Anak di Kaltim Tewas Tenggelam di Lubang Tambang: Saya Lihat Cucu Mengambang di Danau...

Kompas.com - 31/10/2019, 06:26 WIB

BAGIKAN:

Komentar (5)



Iklan oleh Google

Stop What Kian In!

Mengapa Kian In? 0

**LIPUTAN 6**

berita apa yang ingin anda baca hari ini?

CARI

MASUK

HOME NEWS BISNIS SHOWBIZ BOLA FOTO TEKNO CEK FAKTA VIDEO HOT DISABILITAS GLOBAL OTOMOTIF ON OFF

REGIONAL Jawa Timur Sumatera Bali Nusa Sulawesi Jawa Tengah - DIY Jawa Barat Kalimantan Maluku-Papua

Home > Regional > Sumatera

### Sengkarut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Balik Tambang Batu Bara

Rino Abonita  
30 Des 2018, 05:02 WIB



Share  
22

TOPIK POPULER

# COVID-19

# KONTRIBUTOR TV

# SULUT

# KRIMINAL

# NTT





# MineLifeFact

## Demand and Contribution of Mine Material

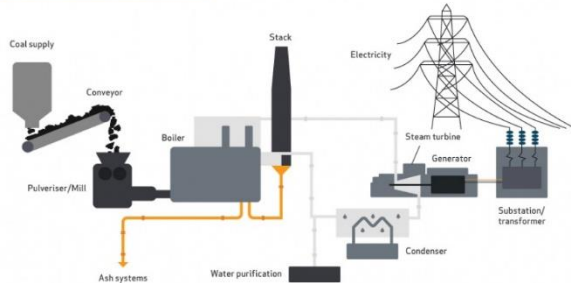
### Every American Born Will Need...



**3 million pounds of minerals, metals, and fuels in their lifetime**

Source: Minerals Education Coalition, U.S. Global Investors

### Coal converted into electricity



Source: World Coal Association

- *Tingkat Kelahiran Amerika 3,853 juta/th (terendah sejak 1987)*
- *Dibutuhkan ± 11,55 juta pounds/th bahan tambang*
- *Targer Rasio Elektifikasi 99,9% (Rida Mulyana)*
- *63% dari tota; produksi litrik nasional berasal dari Batubara (2019)*

Indonesia PDB	Terakhir	Sebelum Ini	Tertinggi	Paling Rendah	Satuan
Pertumbuhan PDB (q-to-q)	-2.41	-1.74	4.21	-3.57	Persen [%]
Pertumbuhan PDB (y-on-y)	2.97	4.97	7.16	1.56	Persen [%]
PDB	1126.00	1042.17	1126.00	5.67	Usd - Miliar [M]
PDB Atas Dasar Harga Konstan	2703065.10	2769908.70	2818887.40	340865.20	Idr - Miliar [M]
Pembentukan Modal Tetap Bruto	876315.84	951395.11	951395.11	63970.10	Idr - Miliar [M]
Pdb Per Kapita	4284.70	4120.40	4284.70	657.00	USD [M]
PDB per kapita KKB	11605.90	11161.00	11605.90	4626.00	USD [M]
PDB Sektor Pertanian	71850.80	45657.20	88647.90	37282.50	Idr - Miliar [M]
PDB dari Konstruksi	273624.60	293957.40	293957.40	149919.00	Idr - Miliar [M]
PDB dari Manufaktur	566753.10	573467.90	582944.50	371813.30	Idr - Miliar [M]
PDB dari Pertambangan	200750.70	202263.30	205685.00	171254.70	Idr - Miliar [M]
PDB dari Jasa	52355.60	53578.40	53578.40	23736.80	Idr - Miliar [M]
PDB dari Utilitas	38087.90	40094.30	40094.30	14032.20	Idr - Miliar [M]

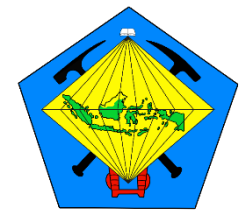
[\*]

Source: TradingEconomics.com

# 2

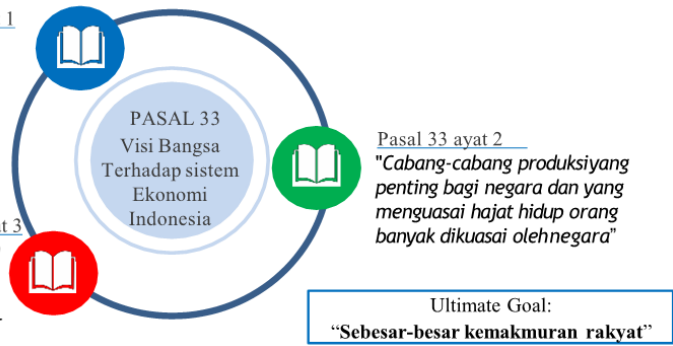
## FILOSOFI HUKUM PERTAMBANGAN





PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MASAJESA PERTAMBANGAN INDONESIA

# SUMBER HUKUM PERTAMBANGAN



- (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
- (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
- (3) Tanah ... haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
- (4) Perusahaan tambang yang besar ... dijalankan sebagai usaha negara. (Hatta, Pankeuk BPUPKI)



# MineLifeFact

SETIAP UNIT SUMBERDAYA ALAM HARUS TERTRANSFORMASI  
MENJADI HUMAN CAPITAL (KAPASITAS)

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

1968, Garret Hardin

“siapa yang kuat mereka yang berjaya” mengakibatkan sumber daya alam sebagai “a commons”. Oleh karena itu diperlukan “rules of game” agar terjadi keseimbangan daya dukung ekosistem (tidak over exploitation) dalam bentuk *environmental protection and management tools*”

1992, Deklarasi Rio di Rio de Janerio

1. Keadilan antar generasi/*intergenerational equity*
2. Keadilan dalam satu generasi yang sama/*intra generational equity*
3. Prinsip pencegahan dini & kehati-hatian /*precautionary & preventive principle*
4. Internalisasi “eksternalitas”
5. Perlindungan keanekaragaman hayati/*biodiversity protection*

1987, World Commission on Environment and Development (WCED)

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”

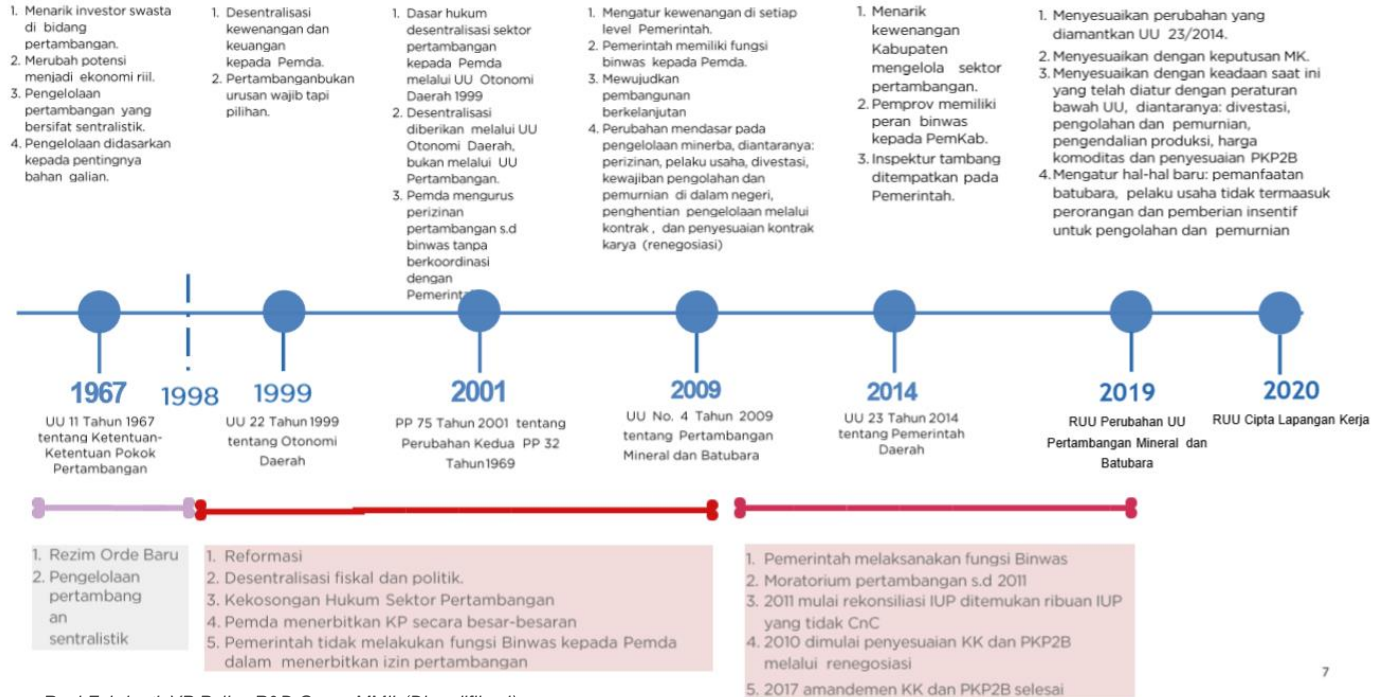
# 3

## Polemik Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara



# Perkembangan Peraturan

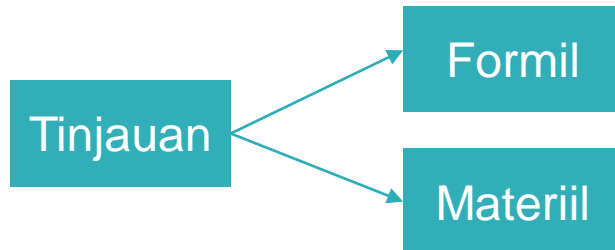
## Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara



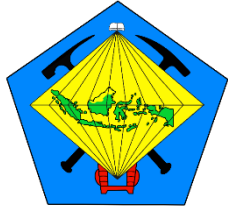
Source: Rani Febrianti, VP Policy R&D Group MMII (Dimodifikasi)

# Polemik

## Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara



- Tidak memenuhi kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A UU 15/2019
- Ketiadaan peran DPD RI sesuai Pasal 22D UUD 1945 dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012
- Melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 UU No.12/2011



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

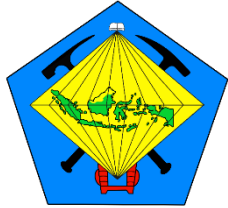
# Pasal 1

UU NO. 3 TAHUN 2020

28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

- Meninggalkan moratorium dibidang eksplorasi
- Berpotensi meningkatkan sumberdaya dan cadangan negara





PERMATA INDONESIA  
PERESTASIAN MANAJEMEN, PERTAMBANGAN INDONESIA

# Pasal 4

UU NO. 3 TAHUN 2020

- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah. (Pertimbangan Putusan MK UU. Migas 22/2001)



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MANAJEMEN PERTAMBANGAN INDONESIA

# Pasal 5

UU No. 3 Tahun 2020

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMANGAN INDONESIA

# Pasal 10

UU NO. 3 TAHUN 2020

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

## UU No. 4 Tahun 2009

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

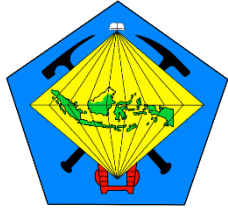
- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

**Penambahan isu HAM dalam hal aspek yang dipertimbangkan memberikan semangat perlindungan kepada masyarakat lingkup tambang terkait dampak adanya kegiatan pertambangan**

## UU No. 3 Tahun 2020

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan mengacu pada **pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak**, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, **hak asasi manusia**, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMANGAN INDONESIA

# Pasal 54

UU No. 3 Tahun 2020

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 54**

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri."

## Pasal 18A Ayat (2)

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.



PERMATA INDONESIA  
PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

# Pasal 75

UU No. 3 Tahun 2020

58. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 75**

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas WIUPK yang akan dilelang;
  - b. kemampuan administratif/manajemen;
  - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan



PERMATA INDONESIA  
PERKUMPULAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

# Pasal 86

UU No. 3 Tahun 2020

(4) SIPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

- ✓ SIPE diberikan untuk pengusahaan **batuan jenis tertentu** dan **untuk keperluan tertentu**.
- ✓ SIPE diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan dari **badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan**.
- ✓ Pemegang SIPE dapat langsung melakukan **Penambangan** setelah memiliki **dokumen perencanaan Penambangan**.
- ✓ Pemegang SIPE dapat diberikan **wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare**.
- ✓ Pemegang SIPE dilarang:
  - a. **mengalihkan SIPE kepada pihak lain**; atau
  - b. **menggunakan bahan peledak** dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan.

Sumber: Paparan Dirjen Minerba, 2020

# Pasal 158 dan 165

UU No. 3 Tahun 2020

## Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



117. Ketentuan Pasal 165 dihapus.

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)





# Pasal 169

UU No. 3 Tahun 2020

119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 169A**

- (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
- kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing– masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
  - kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.



# PANDANGAN

## PERMATA INDONESIA

### Konsistensi regulasi

Peraturan bertujuan agar suatu sistem berjalan dengan baik dan efisien, maka dari itu kejelasan dan kekonsistenan suatu peraturan sangat diperlukan

### Sinergitas Lintas Sektoral

Keserasian (match) antar Lembaga pemerintah diperlukan agar kebijakan dan peraturan yang dibuat sesuai dengan porsinya masing-masing.

### Pembinaan dan Pengawasan

Bimbingan dan ketegasan harus diberlakukan kepada para pemegang IUP agar peraturan bisa dipatuhi dan ditegakkan.

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

### Pertambangan Berkelanjutan

Sumber daya alam tersedia bukan hanya untuk masa kini, tapi juga harus dikelola supaya tersedia di generasi selanjutnya.

### Transparansi dan Partisipasi Publik

Keterlibatan publik harus diperhatikan dan diikutsertakan, karena sumber daya alam pada dasarnya adalah hak bangsa Indonesia dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.



# Konsultasi Publik – Ditjen Minerba



Tidak ketinggalan oleh para akademisi, unsur mahasiswa yang diwakili oleh Perhimpunan Mahasiswa Tambang (Permata) juga memberikan pendapat. Ilham Rifki Nurfajar selaku Sekjen Permata meminta kepada Ditjen Minerba untuk konsisten menyusun dan menjalankan pengelolaan perusahaan pertambangan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Tak ketinggalan, Permata memberikan pendapatnya mengenai isu pertambangan. Permata berharap agar pengawasan pertambangan di daerah lebih digalakkan dengan penempatan IT di daerah dengan menggunakan sistem regional.

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

Sumber : <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20191009-evaluasi-sep-uluh-tahun-undang-undang-pertambangan-mineral-dan-batubara>

# SIKAP

PERMATA INDONESIA

**1, Menimbang prosedur dan substansi undang-undang yang tidak dilakukan pembahasan secara terbuka serta melibatkan partisipasi publik, kami menolak sebagian undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara yang telah disahkan.**

**2, Mempertimbangkan membangun rekonsiliasi gerakan nasional lintas sectoral dan,**

**3, Mempertimbangkan jalur hukum (*judicial review*) terhadap UU No. 3 Tahun 2020 sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola industri pertambangan yang berdaulat dan berkelanjutan.**



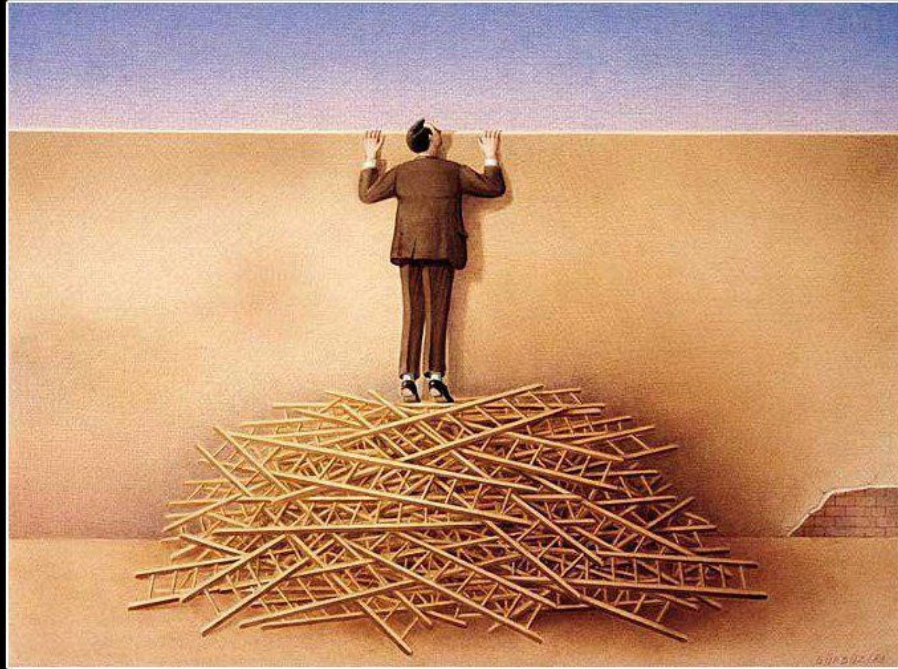


Mari Berdiskusi!



Jika kita masih bersandar dengan **satu negara** misalnya China dalam mengembangkan perekonomian kita, saya rasa kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara **geo-politik**.

It doesn't matter how many resources you have.



If you don't know how to use them,  
it will never be enough.